

KOMUNIKASI POLITIK MUI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

(Studi Kasus Keterlibatan MUI dan Konflik Pilkades di Desa Bojong Kulur,
Gunung Putri, Bogor)

Ayu Ismatul Maula

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Bogor

Email: ayumaula05@gmail.com

ABSTRAK

Keterlibatan para tokoh agama dan masyarakat pada sebuah kegiatan politik bukanlah hal yang asing lagi saat ini. Banyaknya para tokoh agama dan masyarakat yang terjun pada dunia politik sudah pasti memiliki tujuan yang berbeda, seperti halnya pilkades yang terjadi di Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Di desa ini, banyak tokoh agama dan masyarakat yang bergabung dalam kegiatan pilkades dan tersebar pada setiap kubu calon kepala desa. Keterlibatan para tokoh agama dan masyarakat menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik antar kubu calon kepala desa sehingga menyebabkan perseteruan diantara masyarakat desa tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjabarkan keterlibatan tokoh MUI dalam kegiatan politik pemilihan kepala desa. Adapun rumusan masalah diantaranya adalah: Bagaimana keterlibatan tokoh MUI dalam pilkades Desa Bojong Kulur? Bagaimana komunikasi dakwah yang dilakukan oleh tokoh MUI dalam meminimalisir konflik pilkades? Untuk mengetahui keterlibatan tokoh MUI dalam kegiatan pilkades, peneliti menggunakan teori komunikasi politik untuk mengetahui keterlibatan para da'i, menggunakan teori konflik sosial untuk mengetahui macam-macam konflik yang terjadi di desa Bojong Kulur, dan menggunakan teori komunikasi dakwah untuk mengetahui komunikasi yang dilakukan oleh para da'i juga mengetahui strategi dakwah yang digunakan oleh para da'i.

Hasil penelitian ditemukan bahwa komunikasi politik para tokoh MUI pada kegiatan pilkades sebagai tim sukses, pendukung dan penasihat saja, tidak sebagai calon kepala desa. Sedangkan keterlibatannya sebagai para komunikator yang menempati posisi politikus dan aktivis pemuka pendapat. Komunikasi dakwah yang dilakukan oleh MUI dengan cara memberikan pengetahuan dan nasihat seputar politik kepada masyarakat dan melakukan berbagai macam strategi dakwah guna meminimalisir konflik yang terjadi di masyarakat.

Kata Kunci : Da'i, Konflik Sosial, Keterlibatan Politik, Strategi Dakwah.

PENDAHULUAN

Da'i atau Pelaku dakwah memiliki tugas untuk mensyiarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat luas agar bertambahnya wawasan masyarakat tentang agama Islam dan bisa diamalkan dengan baik. Saat ini, da'i tidak hanya berfokus untuk mensyiarkan agama Islam, tetapi juga banyak para da'i yang terjun pada kegiatan politik, wirausaha, dan lain sebagainya.

Yusril Ihza Mahendra selaku guru besar hukum dan ketum PBB pada kegiatan sarasehan internasional di Pondok Pesantren Daar el-Qolam mengajak para santri, kiai, ulama dan tokoh agama lainnya untuk turut serta terjun pada kegiatan politik dengan alasan agar perjuangan para santri, kyai, ulama dan tokoh agama lainnya tidak hanya di pesantren saja, tetapi harus menembus gedung parlemen dan pemerintahan.

Saat ini, para da'i tidak hanya terjun sebagai pelaku politik, tetapi banyak juga para da'i yang menjadi tim sukses dari berbagai kubu baik pada kegiatan pemilu, pilkada maupun pilkades. Rudi Subiyakto dalam Jurnal Ilmu Politik Ilmu Pemerintahan memaparkan Keterlibatan Kiai dalam Pilkada (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006) sebagai bentuk kemampuan para Kiai bisa menciptakan kondisi politik yang kondusif dan peran mereka dalam kegiatan politik sangat menentukan dalam menciptakan masyarakat yang partisipatif. Keterlibatan para kiai dalam Pilkada di Banjarnegara juga terjadi di Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor dalam ajang pemilihan kepala desa.

Pemilihan kepala desa yang sering disingkat pilkades merupakan pesta demokrasi bagi masyarakat untuk memilih kepala desa yang diselenggarakan setiap satu kali dalam kurun waktu enam tahun. Sesuai dengan ketentuan Permendagri 112 tahun 2014 yang membahas tentang pemilihan kepala desa diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan perlu adanya menetapkan Permendagri tentang Pemilihan Kepala Desa.

Seperti halnya Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor akan menggelar Pilkades yang diikuti oleh 88 desa di 34 kecamatan termasuk desa Bojong Kulur yang terletak di kecamatan Gunung Putri, Kabupaten

Bogor. Desa Bojong Kulur ialah desa yang terletak di bagian timur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Desa ini memiliki penduduk kurang lebih berjumlah 52.000 jiwa dengan luas wilayah kurang lebih 477.977 hA.

Pilkades yang diselenggarakan di Desa Bojong Kulur menimbulkan beberapa konflik yang terjadi pada masyarakat seperti beberapa kubu dari calon kepala desa saling berebut tokoh masyarakat dan beberapa tokoh agama, ujaran kebencian juga adu domba diantara pendukung kubu calon kepala desa. Tokoh agama dimanfaatkan oleh pasangan calon (paslon) pilkades agar tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) desa dan beberapa tokoh agama lainnya bisa berkoalisi dengannya. Sebab tokoh agama merupakan panutan bagi masyarakat sehingga diharapkan tokoh agama dapat mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon Pilkades tersebut.

Keterlibatan para tokoh MUI dalam kegiatan pilkades menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik di masyarakat. Tiga kubu saling berlomba dengan sikap yang tidak kompetitif dalam memperebutkan tokoh MUI dan tokoh-tokoh agama lainnya. Konflik tersebut menimbulkan dampak perseteruan, perpecahan, ketegangan, sikap resistensi dan sikap yang kurang kompetitif dari ketiga calon pilkades. Hal ini diperparah dengan kondisi negara yang mengalami wabah Pandemi Covid-19, sehingga ketentraman masyarakat menjadi terganggu.

Sedangkan di sisi lain, seorang pemuka agama atau tokoh agama meliputi Majelis Ulama Indonesia (MUI), kyai dan ustadz adalah *pioneer* masyarakat dalam pemberdayaan dalam masalah agama. Menurut Sayyid Quthub, tugas pendakwah hakikatnya adalah menyebarkan ajaran agama islam yang tidak hanya secara lisan tetapi disertai keteladanan dan perbuatan nyata. Dakwah merupakan upaya para da'I untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dengan cara meyakini juga mengaplikasikan ajaran dan nilai islam sehingga hidupnya menjadi lebih baik, hak asasinya terlindungi, bahagia, dan sejahtera.

Dari identifikasi masalah diatas, maka pendakwah atau tokoh agama di desa Bojong Kulur tidak hanya bisa melakukan kegiatan dakwah tetapi juga turut serta terjun pada kegiatan lain seperti politik yang kehadirannya bisa mendamaikan atau mengurangi konflik yang terjadi pada tiga kubu paslon dan masyarakat.

Masyarakat yang memiliki ketergantungan pada tokoh agama menyebabkan para tokoh agama memiliki kewajiban untuk meminimalisir konflik yang terjadi demi terciptanya masyarakat yang sejahtera sesuai dengan tuntunan islam.

Oleh karena itu, fokus masalah yang akan diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui keterlibatan tokoh MUI dalam pilkades, komunikasi dakwah yang dilakukan oleh tokoh MUI dan mengkaji strategi dakwah yang digunakan oleh para tokoh MUI dalam meredakan dan menyelesaikan konflik politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan dengan cara analisis dan bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana keterlibatan tokoh MUI dalam pilkades, bagaimana komunikasi politik dan komunikasi dakwah yang dilakukan tokoh MUI dalam meminimalisir konflik pilkades.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus menunjukkan pada sebuah fenomena yang diteliti secara mendalam. Fenomena tersebut bisa berupa sebuah kejadian, individu, organisasi, lembaga dan lain sebagainya. Dalam studi ini pengumpulan datanya diperoleh melalui beberapa cara seperti wawancara, observasi pelibatan dan dokumentasi.

Konsep utama dari studi kasus ialah untuk mempelajari dan menginterpretasi suatu kasus tanpa intervensi pihak luar. Studi kasus juga menyoroti suatu keputusan seperti mengapa keputusan tersebut diambil oleh tokoh MUI, bagaimana keputusan tersebut diterapkan dan hasil apa yang ditunjukkan dari keputusan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konflik Politik

Pilkades yang terjadi di desa Bojong Kulur memang terbilang sukses dan lebih baik daripada periode-periode sebelumnya, tetapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di

masyarakat sehingga menimbulkan konflik antar kubu calon dikarenakan bedanya pilihan tidak bisa dihindari, terlebih saat masa pencalonan dan kampanye yang dilakukan oleh para calon kepala desa. Konflik tersebut sering terjadi karena perbedaan pilihan dan saling adu kehebatan antar calon kepala desa yang dipilih sehingga sering kali terjadi kesalah pahaman dan permasalahan diantara masyarakat, baik yang terjadi dalam keluarga, antar tetangga maupun perbedaan lingkungan RT.

Selain masyarakat yang berkelompok pada kubu calon, informasi terkait konflik juga mudah tersebar di media sosial baik pada media sosial *whatsapp* maupun *facebook*. Pada media sosial ini lebih sering menimbulkan konflik baru karena sebagian besar pendukung yang memiliki akun media sosial akan membagikan pendapatnya baik tentang keadaan pilkades, calon yang mereka pilih dan lainnya sehingga lebih sering menimbulkan permasalahan baru.

Dari hasil observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti ketika terjun di lapangan, konflik pilkades fitinjau dari level tingkatan konflik adalah:

1. Level Interpersonal Conflict

Konflik yang terjadi ialah menjelang kegiatan pilkades, banyak para pendukung dari tiap calon saling menguatkan pilihan masing-masing di media sosial, lebih khusus pada media sosial *facebook*. Selain mempromosikan, banyak pula dari pendukung kubu lain yang menjatuhkan kubu lainnya dengan cara memaparkan

kekurangan atau aib dari salah satu calon kepala desa. Selain itu, banyak pula dari mereka yang tidak suka dan tidak terima dengan keputusan *golput berjama'ah* yang dilakukan oleh mayoritas pendukung Ibu Miatun.

2. Level Intragroup Conflict

Konflik yang terjadi pada kubu calon nomor 1 yakni Bapak Firman Riansyah, pada kasus ini terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab merusak baliho kubu 1 yang terdapat gambar calon kepala desa nomor urut 1 di dekat pasar utama Bojong Kulur dan di dekat gapura desa Bojong Kulur. Peristiwa tersebut langsung disebar luaskan oleh para pendukung dan tim sukses dari kubu firman lewat media sosial berupa facebook, whatsapp, dan media sosial lainnya. Baliho tersebut pun tidak langsung diperbaiki oleh tim sukses, dengan pertimbangan untuk memberitahu masyarakat bahwa terdapat kedzaliman yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan pemaparan data-data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa konflik politik pilkades yang terjadi di Desa Bojong Kulur menempati tiga level, yakni: Level Interpersonal Conflict, yang merupakan konflik yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya. Level Intragroup Conflict, merupakan konflik yang terjadi pada satu kelompok saja. Dan Level Intergroup Conflict, yakni konflik yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Adanya konflik-konflik yang terjadi antar

warga dan antar kubu para calon kepala desa. Hal ini menjadi catatan penting bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat sekitar untuk lebih peduli dan memantau masyarakat, terlebih kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang turut terjun dalam kegiatan politik untuk lebih sering melakukan komunikasi yang baik pada anggota kubu tersebut.

B. Keterlibatan MUI dalam Pilkades

Tindakan yang dilakukan oleh para tokoh MUI dengan keterlibatannya dalam kegiatan pilkades di desa Bojong Kulur harus diseimbangi dengan melihat keadaan masyarakat di desa tersebut. Karena apabila keterlibatan mereka dalam kegiatan pilkades justru membuat masyarakat semakin terpecah belah, maka hal tersebut akan menimbulkan konflik lainnya.

Pada masa pemilihan calon kepala desa yang berlangsung sekitar tiga bulan, para tokoh MUI selalu menghimbau kepada masyarakat dengan cara memberikan nasihat untuk tetap tenang dan tidak tersulut emosi ketika ada beberapa pihak yang dengan sengaja menyebarkan isu yang tidak sesuai fakta lalu membuatnya menjadi tidak terkontrol. Berbagai tindakan berusaha dilakukan oleh tokoh MUI seperti mengajak diskusi masyarakat yang berkonflik, berdiskusi dengan sesama tim sukses dan para tokoh agar bisa meredam permasalahan-permasalahan yang sering kali muncul pada kegiatan pilkades, dengan harapan agar masyarakat tetap bersatu meskipun pada pemilihan kepala desa mereka memiliki calon yang berbeda.

Keterlibatan para tokoh berpengaruh dalam kegiatan besar seperti halnya pilkades khususnya bagi para tokoh agama memiliki sisi negatif juga sisi positif. Dilihat dari sisi negatifnya, kegiatan pilkades bukanlah ranah yang sesuai dengan visi dan misi seorang tokoh agama yang seharusnya bergerak pada kegiatan dakwah pada masyarakat. sedangkan jika diamati lebih lanjut, keterlibatan para tokoh agama dalam kegiatan politik memiliki sisi positif sebagai pengontrol, pencegah dan penasihat kepada masyarakat yang turut terlibat dalam kegiatan politik, baik bagi mereka yang terjun langsung sebagai calon, tim sukses maupun pendukung yang mendeklarasikan dirinya secara terang-terangan.

Adanya kegiatan pilkades di desa Bojong Kulur mengharuskan para tokoh agama khususnya tokoh MUI desa agar tersebar pada kubu-kubu calon kepala desa, seperti yang dikatakan oleh sekretaris tokoh MUI bahwa pilkades harus diikuti oleh setiap lapisan masyarakat, kecuali bagi mereka yang belum memiliki kartu tanda penduduk.

Tokoh MUI diberikan kebebasan untuk memilih siapa yang akan mereka jadikan pilihan calon kepala desa dengan beberapa syarat diantaranya tidak membawa bendera MUI atau gelar sebagai tokoh MUI, mengatasnamakan lembaga MUI untuk terlibat dalam kegiatan pilkades, sehingga para tokoh MUI yang terlibat dalam kegiatan pilkades murni sebagai diri mereka sendiri, tanpa membawa nama sebagai salah satu anggota dari MUI desa.

C. Komunikasi Politik MUI

Komunikasi Politik yang dilakukan oleh para tokoh MUI pada ajang pemilihan kepala desa Bojong Kulur memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan pilkades, dikarenakan selain menjadi tim sukses, mayoritas dari tokoh MUI menjadi komunikator politik yang berfungsi memberikan opini kepada masyarakat terkait calon kepala desa yang mereka dukung. Pilkades 2020 di desa Bojong Kulur terbilang sukses dikarenakan serangkaian acara sejak pencalonan, kampanye hingga pemilihan terpantau aman dan terkendali, meskipun terdapat beberapa permasalahan dan kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat.

Kegiatan politik yang melibatkan masyarakat sebagai partisipasi tentunya tidak terlepas dari konflik atau permasalahan yang ditimbulkan karena adanya perbedaan pilihan, baik konflik yang terjadi ditengah masyarakat ataupun konflik yang terjadi didalam kubu calon kepala desa sendiri. Selain terjadi konflik, juga terdapat penyelesaian atau meminimalisir konflik yang terjadi oleh para tokoh yang berpengaruh, salah satunya ialah tokoh MUI. Para asatidz yang bergabung dalam tubuh MUI memiliki peran penting dalam meminimalisir dan menyelesaikan permasalahan ditengah masyarakat, dikarenakan masyarakat desa Bojong Kulur merupakan masyarakat yang agamis, yang memiliki ketergantungan terhadap para tokoh agama.

D. Komunikasi Dakwah MUI

Komunikasi dakwah merupakan hal penting bagi seorang tokoh agama untuk diketahui demi

terlaksananya dakwah dan ajaran-ajaran agama islam yang akan disampaikan kepada khalayak luas. Sebelum seseorang melakukan dakwah, baiknya ia mempelajari secara terperinci segala hal yang terkait dengan komunikasi dakwah, baik metodenya, unsurnya maupun strategi dakwahnya agar cara yang diambil bisa sesuai dengan keadaan khalayaknya.

Komunikasi dakwah yang dilakukan oleh para tokoh MUI terkait adanya politik pilkades dan konflik pilkades yang terjadi di desa Bojong Kulur ialah dengan cara memberikan pengetahuan kepada masyarakat seputar politik yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, memberikan nasihat-nasihat kepada masyarakat sekitar agar tidak terlalu berlebihan dalam berpolitik. Hal tersebut dilakukan oleh para tokoh di pengajian, baik di majelis taklim, musholla ataupun masjid. Menurut MUI, saat pengajian merupakan waktu yang tepat untuk melakukan penyelesaian konflik karena di pengajian, masyarakat akan berkumpul untuk mencari ilmu, dan saat pengajian pula para tokoh lebih leluasa untuk memberikan nasihat dan pengetahuan secara langsung.

Konflik-konflik pilkades yang terjadi sejak pencalonan hingga pemilihan di desa Bojong Kulur tidak bisa dihindari karena pilihan masyarakat yang berbeda dan merasa bahwa calon yang diusungnya lebih baik daripada calon lainnya menyebabkan terjadinya banyak konflik yang terjadi di desa Bojong Kulur. Sehingga, adanya para tokoh khususnya tokoh MUI baik yang terlibat secara langsung maupun tidak

langsung dalam kegiatan pilkades memiliki peran penting untuk menyelesaikan atau meminimalisir konflik-konflik yang terjadi di masyarakat, baik konflik yang terjadi antar individu maupun konflik yang terjadi antar kubu calon kepala desa.

Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Tokoh MUI banyak digunakan melalui strategi dakwah dikarenakan masyarakat desa Bojong Kulur yang agamis, yang kesehariannya terdapat pengajian baik di musholla, majelis taklim maupun masjid. Kegemaran mengaji yang dimiliki oleh masyarakat dimanfaatkan oleh para tokoh MUI untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait pilkades, keberhasilan ataupun kegagalan yang didapatkan oleh para tokoh tergantung pada strategi dakwah yang dimiliki oleh setiap tokoh.

Selain melewati pengajian, banyak pula para tokoh MUI yang melakukan komunikasi dakwah guna menyelesaikan konflik dengan beberapa strategi dakwah lainnya, seperti halnya berdiskusi dan membuat forum guna membahas dan menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Diskusi tersebut dilakukan dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya juga kepada masyarakat yang berkonflik secara langsung dengan harapan konflik bisa diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik yang lebih besar.

KESIMPULAN

Keterlibatan para tokoh MUI dalam kegiatan politik pilkades menempati dua posisi, yakni politikus dan aktivis pemuka pendapat.

Tokoh MUI politikus ialah mereka yang menjadi tangan kanan atau kepercayaan para calon kepala desa, selain itu mereka juga berperan untuk memberikan nasihat dan saran kepada para calon dan para pendukung, sedangkan tokoh MUI sebagai aktivis pendapat merupakan mereka yang memiliki peran untuk mempengaruhi keputusan orang lain dengan cara meyakinkan banyak masyarakat akan calon pilihannya.

Komunikasi politik yang dilakukan oleh para tokoh MUI di desa Bojong Kulur menempatkan mereka sebagai seorang komunikator politik, bukan sebagai pelaku politik yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa pada ajang pilkades 2020. Pada kegiatan ini, mereka memiliki peran sebagai seorang yang mendukung para calon dengan fungsi yang berbeda sesuai dengan yang dibutuhkan para calon kepala desa sehingga membuat para tokoh tersebut turut terlibat secara langsung pada kegiatan politik pilkades.

Banyaknya konflik yang terjadi saat kegiatan pilkades dimulai dari pencalonan, pendaftaran, kampanye hingga pemilihan calon kepala desa menyebabkan para tokoh MUI memiliki peran penting lainnya, yakni sebagai tokoh yang turut serta dalam menyelesaikan atau meminimalisir konflik yang terjadi di masyarakat. konflik yang terjadi di desa tersebut merupakan konflik antar individu dan konflik antar kelompok disebabkan adanya perbedaan pilihan calon kepala desa sehingga masyarakat terpecah.

Adanya konflik tersebut menyebabkan para tokoh MUI melakukan penyelesaian konflik dengan melakukan komunikasi dakwah kepada jama'ahnya, hal ini dikarenakan masyarakat yang memiliki ketergantungan pada tokoh agama dan para tokoh agama yang bergerak di jalan dakwah sehingga banyak dari mereka yang melakukan penyelesaian konflik dengan jalur dakwah.

Komunikasi dakwah yang dilakukan para tokoh MUI ialah dengan cara memberikan pengetahuan kepada masyarakat seputar politik yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, selain itu juga memberikan nasihat-nasihat agar tidak terlalu berlebihan dalam berpolitik. Hal tersebut mayoritas dilakukan oleh para tokoh di pengajian baik di majelis taklim, musholla ataupun masjid. Menurut mereka, pada saat pengajian merupakan waktu yang tepat untuk melakukan penyelesaian konflik karena banyak masyarakat yang berkumpul saat pengajian membuat mereka lebih leluasa untuk memberikan nasihat dan pengetahuan secara langsung.

Selain melewati pengajian, banyak pula para tokoh MUI yang melakukan komunikasi dakwah guna menyelesaikan konflik dengan beberapa strategi dakwah lainnya, seperti halnya berdiskusi dan membuat forum guna membahas dan menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Diskusi tersebut dilakukan dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya juga kepada masyarakat yang berkonflik secara langsung dengan harapan konflik bisa

diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Baharuddin. 2014. *Tugas dan Fungsi Dakwah dalam Pemikiran Sayyid Quthub*. Dakwah Tabligh, 15 (1), 128.
- Amin, Samsul Munir. 2015. *Sejarah Dakwah*. Amzah, Jakarta.
- Antara dan Juli Hantoro. 2020. *Pemkab Bogor tetap Gelar Pilkades Serentak 2020* <https://metro.tempo.co/read/1376284/pemkab-bogor-tetap-gelar-pilkades-serentak-2020> (diakses 27 November 2020).
- Aziz, Moh. Ali. 2006. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- Alwasilah A Chaedar, 2018. *Pokoknya Studi Kasus Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Dunia Pustaka Jaya.
- Cangara, Hafied, 2009. *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Cholisin, dkk. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Dermawan, Andy. 2002. *Metodologi Ilmu Dakwah*. Yogyakarta: Lesfi.
- Dewi, Radix Prima dan Siti Nur Hidayah. 2019. *Studi Kasus Metode Penelitian Kualitatif*. STAIN Sorong.
- Djuyandi, Yusa. 2017. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: Rajawali Press.

- Ghofur, Abdul. 2019. Peran Ulama Sebagai Resolusi Konflik Carok di Desa Kaliboto Kidul, Lumajang. Jurnal Dakwatuna, Vol. 05. No. 1.
- Ghony, M. Djunaidi. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Pirol, Abdul. 2018. Komunikasi dan Dakwah Islam. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahardjo, Mudjia. 2017. Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif; Konsep dan Prosedurnya. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Razzaq, Abdur. 2017. Dakwah dan Pemikiran Politik Islam: Kajian Teoritis dan Empiris. Noerfikri Offset, Palembang.
- Trans, 2018. “Ulama & Tokoh Agama, Darurat terjun ke dunia politik, jangan hanya jadi penonton”,
<https://www.transbojonegoro.com/2018/03/para-santri-ulama-dan-tokoh-agama-darurat-terjun-ke-dunia-politik-jangan-hanya-jadi-penonton/> (diakses pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 11.20 WIB)